

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan utama yang dirasakan oleh petani dipedesaan dalam kegiatan usahatani adalah keterbatasan akses layanan usaha, terutama dalam permodalan. Pada dasarnya petani dihadapkan pada ketidakmampuan dalam mengakses permodalan. Sehingga pemerintah mencanangkan berbagai program bantuan modal kepada petani yang bertujuan untuk meringankan ataupun membuka jalan bagi petani untuk memperoleh permodalan.

Bantuan modal dari pemerintah ini ternyata belum mampu menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi permodalan. Hal ini karena petani penerima bantuan memiliki pandangan yang salah terhadap bantuan, dimana petani beranggapan bahwa bantuan yang diberikan tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah sehingga partisipasi petani tergolong rendah dalam segi mengembalikan ataupun menjaga serta mengembangkan modal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mengadakan program dengan inovasi pada kelembagaan ditingkat petani untuk mendapatkan akses permodalan petani.

Adapun salah satu program tersebut adalah bantuan program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) oleh Kementerian Pertanian dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program prioritas dalam rangka memberdayakan atau meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan. Yaitu dengan mengarahkan bantuan pada bentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan.

Pembentukan LKM-A sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 90/Per/SM.820/J/12/12 menjelaskan bahwa LKM-A adalah Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan dan dikelola oleh petani di pedesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan simpanan dilingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis (Hanggana, 2017).

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang menerima dana PUAP pada tahun 2011 yaitu pada Gapoktan Simande Angin yang tepatnya berada di Desa Sei Beras Sekata. Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diterima diarahkan dan dibina untuk pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan Simande Angin.

Hasil survei yang dilakukan pertama dilapangan, menunjukkan bahwa pembentukan LKM-A pada Gapoktan Simande Angin ini didasari dari bantuan pemerintah dan juga didorong dari tingginya dukungan petani mau terlibat untuk mengembangkan kelembagaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemauan petani untuk ikutserta menghadiri kegiatan musyawarah pendirian LKM-A dan memberi banyak masukan pada kegiatan rapat mengenai proses pelaksanaan kegiatan LKM-A tersebut.

Pelaksanaan LKM-A ini juga didorong dari adanya rasa saling percaya dan kemauan yang dimiliki oleh petani untuk berkontribusi memberikan bantuan dana sendiri dan mau menabung pada lembaga sesuai kesepakatan rapat untuk menambahkan modal LKM-A Gapoktan Simande Angin. kemudian petani juga meluangkan waktunya untuk tetap melakukan pengawasan terhadap LKM-A agar tetap berjalan sesuai dengan harapan. selanjutnya untuk mencapai LKM-A yang berkembang dan bisa memperoleh hasil maka petani juga tidak ragu-ragu membantu semampunya.

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat yang kegiatannya dilakukan secara bersama-sama tentunya tidak terlepas dari permasalahan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan survei yang dilakukan pada LKM-A Simande Angin ditemukannya suatu permasalahan yang dialami yaitu, permasalahan secara internal dalam kepengurusan dan pengembalian modal yang tidak lancar atau macet. Menurut Ketua dari LKM-A tidak lancarnya pengembalian modal disebabkan oleh rendahnya partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan serta menurunnya kehadiran petani dalam kegiatan musyawarah, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman petani tentang pemberian modal sehingga petani tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan modal. Tingkat pengembalian modal yang rendah akan berpengaruh pada pemberian modal bagi calon anggota kelompok tani selanjutnya.

Program bantuan modal yang diberikan pemerintah tersebut tentunya memiliki tujuan yang sudah dicanangkan dan harus dicapai, sehingga untuk mewujudkan tujuan program pemerintah tersebut maka dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang terlibat dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat memegang bagian terpenting demi kemajuan masyarakat dalam mewujudkan suatu tujuan bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan selalu diarahkan kepada kondisi yang lebih baik, sehingga keadaan yang lebih baik tersebut akan dirasakan oleh individu, keluarganya, kelompoknya, masyarakatnya dan bangsanya.

Pelaksanaan program PUAP dalam bentuk LKM-A membutuhkan partisipasi petani dalam berbagai kegiatan yang diadakan, karena pada dasarnya petanilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program. Terkait dengan ketidakefektifan partisipasi dan tidak lancarnya pengembalian modal pada LKM-A Simande Angin di Kecamatan Sunggal, penulis ingin mengetahui tingkat partisipasi petani pada pengelolaan LKM-A Simande Angin di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan LKM-A Simande Angin tersebut.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Keuangan Mikro yang terbentuk sebagai unit usaha otonom simpan pinjam dari Gapoktan penerima dana PUAP kemudian dikenal sebagai LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan bagi para anggota kelompok tani dan warga yang terpilih dari lingkungan ikatan pemersatunya yakni pada tingkat desa yang sepakat untuk bekerjasama saling menolong dengan menabung secara teratur dan terus-menerus, sehingga terbentuk modal bersama yang terus berkembang, guna dipinjamkan kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dengan tingkat bagi hasil/jasa tabungan maupun pembiayaan yang layak dan bersaing.

Adapun dalam proses kegiatan LKM-A Gapoktan Simande Angin yang berada di Desa Sei Beras Sekata mulai dihadapkan pada permasalahan yakni dalam perkembangannya kurang berjalan aktif. Hal ini karena terjadinya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah menurunnya partisipasi masyarakat tani

dalam pengelolaan LKM-A tersebut. dimana petani sudah mulai tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai anggota LKM-A dalam pengembalian modal kepada LKM-A, kemudian kehadiran untuk ikutserta dan terlibat dalam rapat sudah mulai menurun, karena petani LKM-A tersebut sudah jarang mengikuti kegiatan sosialisasi yang mengakibatkan berkurangnya motivasi dan pengetahuan tentang pentingnya kegiatan LKM-A yang dilaksanakan tersebut, sehingga partisipasi petani sangat penting untuk pengelolaan LKM-A.

Partisipasi diartikan tidak hanya menyumbang tenaga, tetapi partisipasi harus diartikan lebih luas, yaitu harus menyangkut taraf perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Secara ekonomis, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkatkan aktivitas petani tersebut dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam pengakajian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan LKM-A di Kecamatan Sunggal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan LKM-A di Kecamatan Sunggal?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menetapkan judul tentang *Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Lembaga keuangan Mikro Agribisnis Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.*

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengkajian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan LKM-A di Kecamatan Sunggal.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (Kemauan, kemampuan, kesempatan, sosialisasi, kepemimpinan, kepercayaan) tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan LKM-A di Kecamatan Sunggal.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan meningkatkan teknologi informasi serta pengalaman yang dapat dijadikan referensi.
2. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam mempraktikkan semua ilmu yang telah dipelajari dan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir/komprehensif Diploma IV Polbangtan Medan.
3. Sebagai bahan tambahan untuk pengkajian selanjutnya dan penerapan tindak lanjut untuk meningkatkan aktivitas atau Program Kementerian Pertanian.